

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2010-2022)**

Irmawati Rosaeni<sup>1</sup>

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran,  
Bandung, Jawa Barat, Indonesia

\*Alamat e-mail corresponding author : [irmawatirosaeni@gmail.com](mailto:irmawatirosaeni@gmail.com)

**A B S T R A C T**

*This research aims to determine the effect of Regional Original Income (PAD), Profit Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) on Regional Expenditures. This research uses independent variables, namely Regional Original Income (PAD), Profit Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) while the dependent variable is regional expenditure. The sample for this research is the Regional Budget and Expenditure Realization Report (LRA) for 2010-2022 obtained from the Bandung City Regional Financial and Asset Management Agency. The sampling technique was carried out using the Purposive Sampling method. The research method used in this research is the multiple linear regression research method. The results of this research show that PAD has a significant effect on regional spending, while DBH, DAU and DAK have no effect on spending. Furthermore, overall PAD, DBH, DAU and DAK appear to have an influence of 97.3% on regional spending while the remaining 2.7% is explained by other variables outside the model equation.*

**A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan variabel dependennya adalah belanja daerah. Sampel penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRA) pada tahun 2010-2022 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sedangkan DBH, DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja. Lebih jauh lagi secara keseluruhan PAD, DBH, DAU dan DAK

tampaknya mempunyai pengaruh sebesar 97,3% terhadap belanja daerah sedangkan sisanya sebesar 2,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan model.

## 1. Pendahuluan

Sejak reformasi, sistem pemerintahan sentralis di Indonesia yang selama ini dianut tidak mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas sehingga memunculkan tuntutan kewenangan yang lebih besar dari daerah untuk melaksanakan pembangunan. Hal ini mengarah pada desentralisasi, di mana pemerintah pusat memindahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri (Waris, 2012). Desentralisasi memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat (Fahlevy & Burhanudin, 2022). Tuntutan akan desentralisasi ini diwujudkan dalam UU No. 32 tahun 2004 yang mengalami perubahan menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah (Afandi et al., 2016).

Dalam pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar. (Ramadhani & Utomo, 2019). Aliran dana ini berasal dari pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan keuangan pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan meningkatnya pendapatan daerah, diharapkan belanja daerah juga meningkat. (Yuniarti, n.d.) Instansi pemerintah daerah yang menerima anggaran belanja tentunya harus mampu menunjang pertumbuhan belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah hal penting karena menjadi salah satu kekuatan pertumbuhan ekonomi lokal yang akan membantu membangun masyarakat yang mandiri dan adil (Yuliet Ihalauw et al., 2023). Saat ini belanja pemerintah daerah masih belum mencerminkan kepentingan publik, karena pengalokasian belanja tidak dialokasikan untuk belanja yang produktif yang dapat meningkatkan pelayanan publik. Dimana proporsi belanja lebih didominasi belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung daerah (Yaqin et al., 2018).

Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, beliau mengharapkan jika belanja daerah itu dialokasikan untuk hal yang lebih produktif. (<https://kemenkeu.go.id>). Sri Mulyani juga mengatakan salah satu faktor yang membuat pengelolaan keuangan daerah jadi tidak efisien adalah kondisi dimana proporsi belanja pegawainya lebih besar jika kita bandingkan dengan belanja modal. Bahkan total belanja pegawai bisa mencapai 36,8% sedangkan belanja modal hanya 20%, Penyebabnya adalah ada sebagian anggaran yang digunakan untuk kegiatan birokrasi contohnya biaya perjalanan dinas dan biaya rapat yang cukup besar, padahal pemerintah bisa menggunakan anggaran itu untuk memberi fasilitas

umum bagi masyarakat. (<https://kemenkeu.go.id>).

**Tabel 1**  
**Realisasi Belanja di Kota Bandung**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Belanja Daerah</b>
2010	Rp. 1.238.514.782.719	Rp. 405.699.482.843	Rp. 2.522.680.816.553
2011	Rp. 1.418.329.356.110	Rp. 612.081.890.549	Rp. 3.080.347.679.003
2012	Rp. 1.634.604.768.384	Rp. 806.665.039.823	Rp. 3.490.035.513.075
2013	Rp. 1.791.058.168.884	Rp. 1.064.845.440.308	Rp. 4.027.469.180.321
2014	Rp. 2.193.068.581.307	Rp. 971.440.599.331	Rp. 4.435.589.823.032
2015	Rp. 2.381.935.235.484	Rp. 1.287.802.827.811	Rp. 5.201.938.207.165
2016	Rp. 2.275.389.581.281	Rp. 1.254.021.785.263	Rp. 5.830.413.719.644
2017	Rp. 2.337.929.555.085	Rp. 918.875.016.069	Rp. 5.540.817.365.842
2018	Rp. 2.536.996.464.878	Rp. 1.049.696.223.623	Rp. 6.114.449.093.123
2019	Rp. 2.535.338.719.039	Rp. 1.179.429.469.424	Rp. 5.131.020.269.061
2020	Rp. 2.169.321.718.452	Rp. 558.480.387.618	Rp. 5.372.019.732.054
2021	Rp. 2.236.006.671.238	Rp. 721.566.424.793	Rp. 5.646.807.120.638
2022	Rp. 2.480.313.890.636	Rp. 644.171.724.240	Rp. 6.446.027.711.554

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (LRA) Kota Bandung

Pada tabel 1 di atas menunjukkan proporsi belanja pegawai dan belanja modal dalam belanja daerah, dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan di Kota Bandung masih belum efisien karena rata-rata proporsi belanja pegawai mencapai 44% dari belanja daerah, sedangkan belanja modal hanya 20% dari belanja daerah. Hendaknya pemerintah daerah memproporsikan lebih besar belanja modal, agar terciptanya peningkatan infrastruktur yang akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah Hal ini dapat merugikan masyarakat, sebab pembangunan infrastruktur publik mungkin tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan dana belanja modal (Mutmaina, 2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini secara detail meneliti pengaruh dari dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU dan DAK terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, DBH, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Bandung

tahun 2010-2022).

Penelitian ini penting karena pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien mengingat peningkatan dana transfer dan belanja daerah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang baik. Kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD masih belum signifikan dan rendahnya kemampuan dalam memprediksi pendapatan daerah mempengaruhi pungutan yang optimal. Tingginya ketergantungan transfer pusat juga tidak diikuti dengan perbaikan governance. Kebaruan penelitian ini adalah dana transfer yang lebih detail dibagi ke dalam DBH, DAU dan DAK serta sampel yang digunakan adalah pemerintah kota dengan pengamatan selama 13 tahun.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah di Kota Bandung. Penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis dalam upaya perbaikan terkait pelaksanaan otonomi daerah, serta penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Agency theory merupakan kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal) merupakan hubungan keagenan (Jensen et al., 1976). Asumsi dasar teori agensi, yaitu bahwa manusia pada dasarnya bersifat mementingkan diri sendiri dan cenderung membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri (Cuevas-Rodríguez et al., 2012). Menurut teori ini, salah satu cara untuk mengarahkan kepentingan diri para agen sehingga sejalan dengan kepentingan principal adalah melalui taktik penyalarsan insentif. Taktik ini bertujuan untuk memotivasi agen agar bertindak sesuai dengan kepentingan principal dengan cara yang benar (Purbayati et al., 2022); (Pakpahan et al., 2022).

Organisasi sektor publik tidak terlepas dari masalah keagenan, pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar Agency Theory (Rivanda et al., 2021); (Sudarsana & Rahardjo, 2013). Hal ini diperkuat dengan pernyataan (Lane, 2000) yang menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Dalam hubungan ini, pemerintah daerah yang berperan sebagai agen diharapkan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal yaitu pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan mengimplementasikan kebijakan dengan cara yang memaksimalkan kebaikan publik (Sudarsana & Rahardjo, 2013).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah**

Pada Agency Theory dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemerintah pusat dan masyarakat. Besarnya PAD suatu daerah akan menjadi salah satu faktor dalam menentukan belanja daerah, hal ini sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun berdasarkan

kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Semakin tingginya PAD yang dihasilkan maka daerah tersebut memenuhi kebutuhan belanja daerahnya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat, ini menandakan bahwa daerah sudah mandiri, begitupun sebaliknya (Rahmat & Handayani, 2016). Hal ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ernayani, 2017), (Sofyani & Subadriyah, 2020) dan (Astutiwaty, Lukita, & Astriani, 2022) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

### **H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Terhadap Belanja Daerah**

#### **Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari dana perimbangan yang merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Ferdiansyah et al., 2018a). Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ernayani, 2017), dan (Fadilah & Helmayunita, 2020). menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Berbeda dengan hasil penelitian (Handayani et al., 2022) dan (Astutiwaty, Lukita, & Astriani, 2022) yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

### **H<sub>2</sub>: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh Terhadap Belanja Daerah**

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah**

Dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dalam mewujudkan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) mendorong peningkatan belanja daerah lebih tinggi dibanding dengan PAD (Nawawi, 2021). Dana ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Astutiwaty, Lukita, & Astriani, 2022) dan (Ernayani, 2017) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Sedangkan penelitian dari (Sofyani & Subadriyah, 2020) menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

### **H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh Terhadap Belanja Daerah**

#### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah**

Dana Alokasi Khusus (DAK) ini diberikan oleh pusat kepada daerah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dalam bentuk pembangunan daerah. Sehingga DAK erat hubungannya dengan belanja daerah, agar pemerintah daerah bisa melakukan pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Astutiwaty, Lukita, & Astriani, 2022) dan (Cantika & Rivandi, 2023) menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ernayani, 2017) dan (Ferdiansyah et al., 2018b) yang

menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

**H<sub>4</sub>: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh Terhadap Belanja Daerah**

**H<sub>5</sub>: PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh Terhadap Belanja Daerah**

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut (Afgani et al., 2021) analisis deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang menguji menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Kota Bandung tahun 2010-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* yaitu *purposive sampling*.

#### Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 4 variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>), Dana Bagi Hasil (X<sub>2</sub>), Dana Alokasi Umum (X<sub>3</sub>) dan Dana Alokasi Khusus (X<sub>4</sub>). Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah Belanja Daerah. Seluruh variabel diukur dengan skala pengukuran rasio. Data yang dihasilkan kemudian melalui pengujian asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda (Rivanda et al., 2022); (Ghozali, 2016).

#### Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel terikat dan variabel bebas pada penelitian ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah indikator variabel PAD adalah:

1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

**b. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan indikator variabel DBH yaitu:

1. Dana Bagi Hasil Pajak
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

**c. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan indikator

variabel DAU adalah:

1. Celah Fiskal
2. Alokasi Dasar

**d. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan indikator variabel DAK yaitu:

1. Kriteria Umum
2. Kriteria Khusus
3. Kriteria Teknis

**e. Belanja Daerah**

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan indikator variabel Belanja Daerah adalah:

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

**4. Hasil dan Pembahasan**

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Berdasarkan hasil uji pada tabel 1 Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* di bawah ini, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,854. Ini artinya data dari setiap variabel berdistribusi normal, karena sesuai dengan teori jika nilai signifikansi > 0,05 maka data dari setiap variabel berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai signifikansi sebesar 0,854 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

**Tabel 2**  
**Uji Normalitas *Kolmogroff-Smirnov***

		<i>Unstandardize</i>
		<i>Residual</i>
N		13
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000007
	Std. Deviation	210430543.8
Most Extreme Difference	Absolute	.169
	Positive	.169
	Negative	-.130
Kolmogorov-Smirnov Z		.608

Assymp. Sig. (2-tailed) .854

Sumber: data diolah, Output SPSS

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 3 Uji Multikolinearitas di bawah ini, diketahui bahwa keempat variabel independent memiliki nolai tolerance yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10,0. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada variabel independent yang akan diteliti.

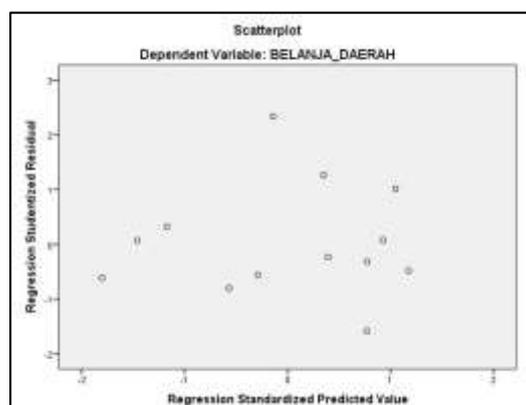
**Tabel 3**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardize Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1842580559	1108233913		1.663	.135		
PAD	.742	.227	.575	3.261	.012	.107	9.324
DAU	.958	.762	.193	1.258	.244	.141	7.067
DAK	1.556	.681	.268	2.286	.052	.243	4.114
DBH	-.957	1.171	-.071	-.818	.437	.443	2.258

Sumber: data diolah, Output SPSS

### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 1 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot di bawah ini terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, ini artinya data yang diteliti terbebas dari masalah heteroskedastisitas.



**Gambar 1**

**Gambar Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot**

### Uji Autokorelasi

Pada tabel 4 Uji Autokorelasi Durbin Watson di bawah ini, diperoleh nilai DW sebesar 0,437. Karena nilai DW terletak antara dL dan dU atau diantara (d-dU) dan (4-dL) maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti sehingga memerlukan runs test dengan syarat nilai Asymp.sig (2 tailed) harus lebih besar dari 0,05.

**Tabel 4**  
**Uji Autokorelasi Durbin Watson**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.987 <sup>a</sup>	.973	.575	-.818	.437
a. Predictors (Constant), DBH,DAK,DAU,PAD					
b. Dependent Variable: Belanja_Daerah					

Sumber: data diolah, Output SPSS

Pada tabel 5 Uji Autokorelasi Run Test di bawah ini, didapatkan nilai Asymp.sig (2 tailed) sebesar 0,982 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak memiliki masalah autokorelasi.

**Tabel 5**  
**Uji Autokorelasi Run Test**

	<i>Unstandardize Residual</i>
Test Value <sup>a</sup>	-49647057.53
Cases < Test Value	6
Cases >= Test Value	7
Total Cases	13
Number of Runs	8
Z	.022
Assymp. Sig. (2-tailed)	.982

Sumber: data diolah, Output SPSS

Berdasarkan keempat hasil uji asumsi klasik di atas, diketahui bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran asumsi klasik, sehingga data dapat dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda ditunjukkan melalui tabel 6 di bawah ini. Berdasarkan tabel terlihat nilai koefisien regresi pada nilai *Unstandardized Coefficients Beta*.

**Tabel 6**

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardize Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	1842580559	1108233913	
PAD	.742	.227	.575
DAU	.958	.762	.193
DAK	1.556	.681	.268
DBH	-.957	1.171	-.071

Sumber: data diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel 6 di atas maka diperoleh persamaan :

$$\hat{Y} = 1842580559 + 0,742 X_1 + 0,958 X_2 + 1,556 X_3 - 0,957 X_4 + e \dots\dots(1)$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Konstanta sebesar 1842580559 menyatakan jika PAD, DAU, DAK dan DBH bernilai nol dan tidak ada perubahan, maka biaya untuk memenuhi belanja daerah akan bernilai 1842580559 satuan. Koefisien PAD ( $X_1$ ) sebesar 0,742 artinya setiap kenaikan satu satuan maka Belanja Daerah (Y) akan naik sebesar 0,742 satuan dengan asumsi variabel bebas lain nya tetap. Koefisien DAU ( $X_2$ ) sebesar 0,958 artinya setiap kenaikan satu satuan maka Belanja Daerah (Y) akan naik sebesar 0,958 satuan dengan asumsi variabel bebas lain nya tetap. Koefisien DAK ( $X_3$ ) sebesar 1,556 artinya setiap kenaikan satu satuan maka Belanja Daerah (Y) akan naik sebesar 1,556 satuan dengan asumsi variabel bebas lain nya tetap. Koefisien DBH ( $X_4$ ) sebesar -0,957 artinya setiap kenaikan satu satuan maka Belanja Daerah (Y) akan turun sebesar 0,957 satuan dengan asumsi variabel bebas lain nya tetap.

**Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

Analisis koefisien determinasi ini memperlihatkan sejauh mana pengaruh secara simultan antara variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH dengan belanja daerah. Dasar untuk menyatakan hubungan yang erat adalah apabila nilai  $R > 50\%$ .

**Tabel 7**  
**Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.987 <sup>a</sup>	.973	.575

a. Predictors (Constant), DBH,DAK,DAU,PAD

b. Dependent Variable: Belanja\_Daerah

Sumber: data diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel 7 di atas maka diperoleh nilai R sebesar 0,987 atau 98,7%. Hal ini menunjukkan variabel PAD, DBH, DAU dan DAK mempunyai hubungan yang erat dengan Belanja Daerah. Nilai koefisien determinasi atau R-Square yang diperoleh sebesar 0.973 atau 97,3%. Angka ini menunjukkan bahwa nilai belanja daerah yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh sebesar 97,3% dijelaskan oleh variabel PAD, DBH, DAU dan DAK, sedangkan sisanya sebesar 2,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan model.

**Hasil Uji Hipotesis Statistik**

**Uji Signifikansi Parsial (Uji T)**

Pada uji t di bawah ini, nilai  $t_{tabel}$  yang digunakan sebesar 2,306 yang diperoleh dari tabel t pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 (karena dua sisi jadi nilai signifikansinya 0,025) dan derajat bebas (df) =  $n-k-1 = 13-4-1 = 8$ . Pada tabel 8 terdapat nilai  $t_{hitung}$  yang dibandingkan dengan  $t_{tabel}$ .

**Tabel 8**  
**Hasil Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial**

Model	Unstandardize Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1842580559	1108233913		1.663	.135
PAD	.742	.227	.575	3.261	.012
DAU	.958	.762	.193	1.258	.244
DAK	1.556	.681	.268	2.286	.052
DBH	-.957	1.171	-.071	-.818	.437

Sumber: data diolah, Output SPSS

Dari persamaan regresi di atas memiliki makna sebagai berikut:

- Hasil analisis uji t untuk PAD diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 3,261 >  $t_{tabel}$  sebesar 2,306 dengan nilai signifikan sebesar 0,012 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Bandung.
- Hasil analisis uji t untuk DAU diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 1,258 <  $t_{tabel}$  sebesar 2,306 dengan nilai signifikan sebesar 0,244 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Bandung.
- Hasil analisis uji t untuk DAK diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,286 <  $t_{tabel}$  sebesar 2,306 dengan nilai signifikan sebesar 0,052 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh

terhadap belanja daerah di Kota Bandung.

d. Hasil analisis uji t untuk DBH diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,818 < t_{tabel}$  sebesar 2,306 dengan nilai signifikan sebesar  $0,437 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Bandung.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk melihat bagaimana variabel independen yaitu PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah maka dapat dilakukan Uji F yaitu dengan cara membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ .

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Signifikansi Simultan**

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.939E+19	4	4.848E+18	72.994	.000 <sup>b</sup>
	Residual	5.314E+17	8	6.642E+16		
	Total	1.992E+19	12			

a. Dependent Variable : Belanja\_Daerah

b. Predictors : (Constant), DBH,DAK,DAU,PAD

Sumber: data diolah, Output SPSS

Berdasarkan tabel 9 Hasil Uji Signifikansi Simultan di atas diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 72,994 dengan  $p$ -value (sig) 0,000. Dengan  $\alpha=0,05$   $df_1=4$  dan  $df_2=13-4-1=8$ , maka  $F_{tabel}=6,04$ . Dikarenakan nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$   $72,994 > 6,59$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka artinya secara simultan PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Bandung pada tahun 2010-2022.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Bandung tahun 2010-2022. Sedangkan DBH,DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Bandung tahun 2010-2022.

Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ernayani, 2017) yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Semakin besar PAD yang dihasilkan semakin mandiri daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya sendiri sehingga tidak akan bergantung pada pemerintah pusat (Astutiwaty, Lukita, & Astriani, 2022). Menurut (Sofyani & Subadriyah, 2020) semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, maka daerah tersebut akan semakin leluasa dalam mengutamakan kepentingan masyarakat tanpa muatan

kepentingan pemerintah pusat yang tidak selaras dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di daerah.

Proporsi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja daerah yang cenderung mengalami penurunan akan tetapi belanja daerah tetap mengalami peningkatan. Sehingga hasil penelitian ini menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini sejalan dengan (Handayani et al., 2022) yang menyatakan bahwa tidak adanya korelasi dari DBH terhadap belanja daerah karena didalam dana transfer yang menjadi kunci kebutuhan daerah yang sudah dianggarkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah belum ada yang optimal. (Astutiwaty, Lukita, & Astriani, 2022) menambahkan transfer DBH yang diterima terlalu sedikit sehingga tidak mampu untuk menutupi belanja daerah.

DAU yang diterima oleh Kota Bandung mengalami penurunan di beberapa periode, akan tetapi belanja daerah terus mengalami peningkatan. (Sofyani & Subadriyah, 2020) menyatakan bahwa DAU dialokasikan untuk membiayain belanja pegawai. Di Indonesia setiap tahun terjadi peningkatan belanja daerah utamanya belanja rutin disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang terus menambah jumlah PNS dan kenaikan gaji PNS, sehingga DAU tidak signifikan jika dibandingkan dengan gaji pegawai tersebut.

Proporsi DAK terhadap belanja daerah di Kota Bandung memperoleh rata-rata 3%, setiap tahunnya DAK merupakan sumber dana perimbangan yang paling sedikit jumlahnya. Sehingga sejalan dengan (Ernayani, 2017) bahwa DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Sejalan dengan (Ferdiansyah et al., 2018b) yang menyatakan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh kecilnya DAK yang diterima oleh suatu daerah, selain itu kebutuhan sulit diperkirakan dengan DAU dan kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah di Kota Bandung disertai dengan teori-teori pendukung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima.
- b. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak.
- c. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.
- d. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak.
- e. Hasil uji statistic menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU dan DAK mempunyai pengaruh signifikan dengan gabungan dampak sebesar 97,3% terhadap belanja daerah sedangkan sisanya

sebesar 2,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan model.

Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan di Kota Bandung agar belanja daerah ikut meningkat sehingga bisa mempercepat proses pembangunan daerah. Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh dana perimbangan yaitu DAU, DAK dan DBH yang tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan proporsi DAU, DAK dan DBH yang bisa dialokasikan lebih ke belanja daerah. Kemudian bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variable-variabel lain yang mempengaruhi belanja daerah, melakukan penelitian pada objek lain yang lebih luas dan menggunakan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu data penelitian yang lebih lama.

### Daftar Pustaka

- Afgani, K. F., Rivanda, A. K., & Purbayati, R. (2021). Predicting Corporate Bankruptcy: Based on MDA Textile and Garment on Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2), 1918–1932.
- Afandi, M. N., Sianipar, R., Tinggi, S., Lembaga, I. A., & Negara, A. (2016). Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Analysis Of Local Financial Capabilities In Supporting Local Autonomy In Labuhan Batu Selatan District. In *Jurnal Wacana Kinerja* ▪ (Vol. 19).
- Astutiwyaty, L. L. C. A. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2019. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 242–262.
- Cantika, D. R. M. (2023). Belanja Daerah Dilihat Dari Aspek Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 52–69.
- Cuevas-Rodríguez, G., Gomez-Mejia, L. R., & Wiseman, R. M. (2012). Has Agency Theory Run its Course?: Making the Theory more Flexible to Inform the Management of Reward Systems. *Corporate Governance: An International Review*, 20(6), 526–546.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *Jurnal Sosial, Humaniora Dan Pendidikan*, 43–52.
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana

- Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2). Online.
- Fahlevy, M. R., & Burhanudin, B. (2022). Konsep desentralisasi dalam pelayanan publik (Studi inovasi Samsat Care di Kota Makassar). *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 74–84.
- Ferdiansyah, I., Risma Deviyanti, D., & Pattisahusiwa, S. (2018a). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *INOVASI*, 14(1), 44–52.
- Ferdiansyah, I., Risma Deviyanti, D., & Pattisahusiwa, S. (2018b). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *INOVASI*, 14(1), 44–52.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *SOROT*, 17(1), 41.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press.
- Lane, J. E. (2000). *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. SAGE Publications.
- Mutmaina, Y. R. (2017). Determinan Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(3), 185–198.
- Pakpahan, R., Purbayati, R., Juniwati, E. H., & Rivanda, A. K. (2022). Pemodelan Volatilitas Indeks Saham Infobank 15 Pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(3), 1124–1138.
- Purbayati, R., Pakpahan, R., Juniwati, E. H., & Rivanda, A. K. (2022). Ketahanan Perbankan Syariah Indonesia Terhadap Fluktuasi Kondisi Makroekonomi Dan Kondisi Fundamental Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, XII(2), 115–126.
- Rahmat, A. H. N. (2016). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Lansung. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Ramadhani, S., & Utomo, C. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Dan Dana Bantuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *Majalah Ilmiah Solusi*, 17(1).
- Rivanda, A. K., Arif, I. A. I., & Ramadhan, R. (2022). Pengaruh BI Rate Dan Inflasi Terhadap IHSG

- Dengan Nilai Tukar Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 1828–1841.
- Rivanda, A. K., Muslim, A. I., (2021). Analisis Perbandingan Model Prediksi Financial Distress pada Sub Sektor Textile dan Garment. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK)*, 9(3), 485–500.
- Sofyani, L. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 33–47.
- Sudarsana, H. S., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(4), 1–13.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Waris, I. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 3, Issue 1).
- Yaqin, U. A., Herwanti, T., & Akram, A. (2018). Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Bima). *E-Jurnal Akuntansi*, 2321.
- Yuliet Ihalauw, F., Elim, I., Kapojos, P. M., Akutansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., & SAM Ratulangi Manado, U. (2023). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019-2020 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Masa Pandemi Covid-19* (Vol. 6, Issue 2).
- Yuniarti, F. (n.d.). The Effect Of Local-Owned Source Revenue And Balanced Fund On Capital Expenditure: A Case Study On 3 Regencies/ Municipalities In Malang Raya Year 2007-2016 *Minor Thesis Department Of Economics Faculty Of Economics And Business University Of Brawijaya Malang 2018*.